ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (*E-KATALOG*) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

Sarah Salsa Fadillah
NIM. 07011381823161

Kosentrasi Keuangan Negara Dan Fiskal

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (*E-KATALOG*) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

SARAH SALSA FADILLAH

NIM.07011381823161

Pembimbing I	Tanda Tangan	Tanggal
Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si NIP. 197705122003121003		13 Juni 2022

Pembimbing II		
Januar Eko Aryansah,S.IP.,SH.,M.Si NIP. 19880127 201903 1 005		09 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBELIAN KENDARAAN OPERASIONAL DINAS MELALUI APLIKASI ELEKTRONIK (*E-KATALOG*) DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Skripsi Oleh :

SARAH SALSA FADILLAH
07011381823161

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 30 Juni 2022

Pembimbing:

1. Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si
   NIP. 197705122003121003

2. Jangar Eko Arwansah,S.IP.,SH.,M.Si
   NIP. 198801272019031005

Penguji:

1. Prof.Dr.H.Slamet Widodo,MS,MM
   NIP. 195811191985031003

2. Dr. Katriza Imania, M. Si
   NIP. 196810221997022001

Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Alfitri, M. Si
NIP.196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik

Dr. Muhammad Nur Budi Santo,S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SARAH SALSA FADILLAH
NIM	: 07011381823161
Tempat dan Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 03 Agustus 2000
Program Studi/Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik/Keuangan Negara dan Fiskal
Judul Skripsi	: Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas Melalui Aplikasi Elektronik (*E-katalog*) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumateran Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi sera pernyataan dalam penambahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak beneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang , Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Sarah Salsa Fadillah
0701138182361

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Bekerja Dengan Semangat Dan Penuh Tanggung Jawab Serta Bersikap Transparan, Jujur, Obyektif, Dan Akuntabel Dalam Melaksanakan Tugas"

Atas Ridha Allah SWT,

Skripsi Ini Saya

Persembahkan

Kepada :

1. **Kedua Orang Tua Saya, Bapak Rachman Yuzir dan Ibu Siti Hasanah**
2. **Kedua Saudara saya, Aldo Rizky Pratama dan Qania Muthia Rachman**
3. **Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI**
4. **Rekan Seperjuangan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018**
5. **Almamater Kebanggan**

ABSTRACT

This study entitled "Analysis of the Implementation of Purchasing Service Operational Vehicles Through Electronic Applications (E-catalog) at the Environment and Land Service of South Sumatra Province". South Sumatra . The type of research in this thesis is descriptive research using qualitative research methods. The types of data used are primary data and secondary data, while the data collection techniques in this study were carried out through interviews, observation and documentation. This study uses the theory of procurement of goods proposed by Kalakota and Robinson which consists of three dimensions, namely Ordering, Fulfillment, and Payment. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of purchasing official operational vehicles through electronic applications (E-catalog) at the Environment and Land Service of South Sumatra Province has been going well, but there are still obstacles in the fulfillment of goods in the E-catalog by the provider. The Environment and Land Service of South Sumatra Province ordered nine vehicles, namely six two-wheeled vehicles and three four-wheeled vehicles. in the fulfillment of orders for goods by the Department of Environment and Land of the Province of South Sumatra, all of the providers in the e-catalog have not fulfilled all of them due to the non-display of the purchased goods. The conclusion of this study is that the implementation of purchasing official operational vehicles through the electronic application of e-catalog at the Department of the Environment and Land of South Sumatra Province has been carried out well but there are still obstacles in the aspect of fulfillment. Suggestions from researchers are to procurement officials to increase the availability of goods on the e-catalog.

Keywords : analysis, procurement implementation

ADVISOR I	ADVISOR II
Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si	Juhuar Eko Aryansah,S.IP.,SH.,M.Si
NIP. 197705122003121003	NIP. 198801272019031005

Palembang, Juni 2022
Chairman of the Departement of Public Adminisration
Faculty Social and Political Science
University Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA
NIP.196914401994011001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Oprasional Dinas Melalui Aplikasi Elektronik (*E-katalog*) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan . Jenis penelitian di dalam skripsi ini yaitu penelitian deskriptif yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengadaan barang yang dikemukakan oleh Kalaketa dan Robinson yang terdiri dari tiga dimensi yaitu Pemesanan, Pemenuhan, dan Pembayaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik (*E-katalog*) di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik ,namun masih terdapat kendala dalam pemenuhan barang yang ada pada *e-katalog* oleh penyedia. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemesanan barang sebanyak sembilan buah kendaraan yaitu enam kendaraan roda dua dan tiga kendaraan roda empat. dalam pemenuhan pemesanan barang oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum terpenuhi semua oleh penyedia yang ada pada *e-katalog* yang disebabkan oleh tidak tayangnya barang yang dibeli. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik *e-katalog* di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sudah terlaksana dengan baik namun masih terdapat kendala pada aspek pemenuhannya.Saran dari peneliti adalah kepada pejabat pengadaan untuk meningkatkan lagi ketersediaan barang pada *e-katalog*.

Kata kunci : Analisis, Pelaksanaan Pengadaan Barang

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Sofyan Effendi,S.IP.,M.Si	Fitrawan Eko Aryansah,S.IP.,SH.,M.Si
NIP. 197705122003121003	NIP. 198801272019031005

Palembang, Juni 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Muhammad Nur Budivanto, S.Sos.,MPA
NIP.196911401994011001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan yang berjudul **"Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas Melalui Aplikasi Elektronik (*E-KATALOG*) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan".** Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana S-1 prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan lalu penyusunan skripsi ini sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Alfitri,M.Si., selaku Dekan FISIP UNSRI beserta jajarannya yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi saya.
2. Bapak Dr.M.Nur Budiyanto,S.Sos.,MPAselaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Sofyan Effendi,S,IP.,M.Si, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak waktunya untuk membimbing saya dan membagi ilmunya guna kelancaran skripsi saya.
4. Bapak Januar Eko Aryansah,S.IP.,SH.,M.Si, selaku Pembimbing Skripsi II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya, membagi ilmunya dan memberikan banyak masukan untuk kelancaran skripsi saya.
5. Ibu Dr.Lili Erina,M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan semangat bagi saya dalam menjalankan proses pembelajaran akademik ini selama perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Kedua orang tua saya,dan saudari saya yang selalu memberikan dukungan moril dan materil kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang selalu membantu dan informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman–teman jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2018 atas kebersamaannya sepanjang waktu perkuliahan saya.
9. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam penulisan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

Dengan selesai nya penulis dalam pengerjaan skripsi ini maka diharapkan berguna serta bermanfaat bagi kegiatan akademik, bagi masyarakat umum dalam mengetahui permasalahan yang terjadi lalu ditemukan penyelesaiannya dengan konsep pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kelemahan, kekurangan, maupun suatu kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan agar penulis dapat menjadi lebih baik dalam penulisan.

Palembang, Juni 2022
Penulis

Sarah Salsa Fadillah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SKRIPSI.....iii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v
ABSTRACT.....vi
ABSTRAK.....vii
KATA PENGANTAR.....viii
DAFTAR ISI.....ix
DAFTAR GAMBAR.....xi
DAFTAR SINGKATAN.....xiv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A.Latar Belakang.....1
B.Rumusan Masalah.....9
C.Tujuan Penelitian.....9
D.Manfaat Penelitian.....9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11
A.Landasan Teori.....11
B.Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian.....35
C.Penelitian Terdahulu.....35
D.Kerangka Pemikir.....45
BAB III METODE PENELITIAN.....46
A. Jenis Penelitian.....46
B. Definisi konsep.....47
C. Fokus Penelitian.....47
D. Jenis Dan Sumber Data.....48
E. Informan Penelitian.....49
F. Teknik Pengumpulan Data.....50
G. Teknik Analisis Data.....51
H. Teknik Keabsahan Data.....52
I.Sistematika Penulisan.....53
BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN.....55
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan....55

B. Sumber Daya Manusia Dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan..... 72
C. Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraaan Operasional Dinas Melalui Aplikasi Elektronik di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan..... 74
BAB IVPENUTUP.....91
A. Kesimpulan.....91
B. Saran..... 92
DAFTAR PUSTAKA..... 94
DAFTAR LAMPIRAN..... 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Povinsi Sumatera Selatan tahun 2021.....6

Gambar 1. 2 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021..... 6

Gambar 2. 1 Garis Besar Proses PBJ……..**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 2. 2 Garis Besar Proses PBJP..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 2. 3 Web layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 2. 4 Tampilan Home E-catalouge.....**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 2. 5 Tampilan syarat dan ketentuan E-catalouge **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 2. 6 Alur *E-katalog* Tanpa Negoisasi..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 2. 7 Alur *E-katalog* Menggunakan Negoisasi.**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 1 Gedung Dinas Lingkungan Hidup Dan Perantahan (DLHP) SUMSEL…..**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 2 Peta lokasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 3 Struktur Organisasi DLHP Provinsi Sumatera Selatan**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 4 Surat Perjanjian Kerjasama DLHP dan Penyedia.**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 5 Penawaran/Negoisasi DLHP dan Penyedia **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 6 Surat Pemesanan Kendaraan Operasional Dinas Roda 4 (empat) yang tersedia oleh penyedia di e-katalog..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 7 Surat Pengataran Barang Kepada DLHP SUMSEL. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 8 Pengantaran Barang Oleh Penyedia Kepada PPHP..**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4. 9 Panitia Pemeriksaan dan penerimaan Barang. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Gambar 4.10 Surat Permohonan Pembayaran dan Pembayaran Kendaraan Kepada Penyedia..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Tabel 4. 1 Matriks Hasil dan PembahasanPenelitian.....**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1Surat Tugas Penunjukkan Dosen Pembimbing Usulan Skripsi **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian Di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 3 Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing l. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 4 Kartu Bimbingan Usulan Skripsi Pembimbing ll. **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 5 Lembaran Revisi Seminar Proposal Pembimbing l **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 6 Lembaran Revisi Seminar Proposal Pembimbing ll **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 7 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi**Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing l..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing ll..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 10 Pedoman Wawancara..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 11 Surat Kontrak Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Perihal Pembelian Kendaraan Operasional Dinas Melalui e-katalog ..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

Lampiran 12 Dokumentasi Penelitia..... **Kesalahan! Bookmark tidak didefinisikan.**

DAFTAR SINGKATAN

DLHP = Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan

SUMSEL = Sumatera Selatan

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

APBN = Anggaran Pendapatan Belanja Negara

RUP = Rencana Umum Pengadaan

LKPP = LembagaKebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

SIRUP = Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

PBJ = Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

K/L/D/I =Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/institusi

LPSE = Layanan Pengadaan Secara Elektronik

ULP = Unit Layanan Pengadaan

TKDN = Tingkat Komponen Dalam Negeri

UKPBJ = Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

PP = Pejabat Pengadaan

PPK = Pejabat Pembuat Komitmen

PPHP = Panitia Pemeriksa Hail Pekerjaan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadaan barang dan jasa berdasarkan pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilaksanakan olehKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimanaprosesnya mulai dari identifikasi kebutuhan, sampai serah terima hasil pekerjaan. Menurut Nurchana, Haryono dan Adiono 2014 dalam (adi, 2017, p. 3) pengadaan barang/jasa yakni meliputi penjelasan dari semua proses awal perencanaan, persiapan, perizinan, penentuan pemenang lelang sampai tahap pelaksanaan dan administrasi dalam pengadaan barang/jasa, jasa antara lain yaitu jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan dan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang memperoleh barang/jasa bagi instansi secara transparan, efektif serta efisien yang sesuai pada kebutuhan dan keinginan bagi instasi yang didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada instansi pemerintah pasti akan membutuhkan barang dan jasa yang didapatkan melalui proses pengadaan barang dan jasa.

pelaksanaan merupakan salah satu tugas dari seorang pemimpin organisasi untuk memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan keyakinan kepada bawahannya agar bawahan tersebut bekerja secara ikhlas demi terwujudnya tujuan organisasi. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pada awalnya diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang dan Jasa yang telah beberapa kali di ubah, terakhir pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 perihal Perubahan terhadap Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Dan telah berganti menjadi Peraturan Presiden yang terbaru yakni Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta penyesuaian penggunaan barang/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD.

Pemenuhan kebutuhan barang/jasa adalah komponen terpenting dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan. Tersedianya barang/jasa selaku komponen dari tugas dan tanggung jawab pemerintah bagi upaya pemenuhan kebutuhan rakyat, serta juga kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai tujuan yaitu memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan serta jumlah dan mutu sesuai pada waktunya, prinsip pengadaan barang/jasa dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Dimana salah satu bentukya yaitu dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, dimana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab intansi pemerintah terutama pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan tentu harus didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk pelayanan publik. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan merupakan intansi pemerintah yang bergerak dibidang lingkungan daerah yang meliputi kegiatan dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap segala sesuatu mengenai lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan. DLHP yang bertugas untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan (DLHP) Provinsi SUMSEL memiliki kewajiban memberikan pertanggung jawaban secara finansial kepada pemerintah daerah serta masyarakat sebagai pengguna jasa. Dalam melaksanakan fungsinya yaitu sebagai pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemerintahan sangat dibutuhkan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah pada prinsipnya yaitu untuk memajukan penggunaan produk dalam negeri, serta dapat meningkatkan peran dunia usaha dan industri kreatif dalam rangka mendorong pemerataan ekonomi secara nasional.

Terkait pada usaha pemenuhan kebutuhan tersebut, permerintah daerah telah melakukan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana secara bertahap melalui penganggaran belanja modal pada setiap tahun anggarannya, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Akumulasi pada belanja modal yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, berakibat pada peningkatan jumlah dan nilai aset tetap pemerintah daerah. Pada Peningkatan tersebut juga terjadi pada aset tetap kendaraan dinas. Peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah dan asetnya, sehingga menyadarkan pemerintah agar memiliki sebuah sistem pada pengelolaan aset yang baik serta optimal.

Maka dari itu diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah yang dijelaskan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Barang Milik daerah pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) yang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun Nomor 17 Tahun 2007, antara lain :

1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
2) Barang yang diperoleh lainnya yang sah yaitu :
    a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis
    b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
    c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang

d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengadaan barang/jasa pada awalnya dilakukan secara konvensional dimana pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara manual, baik itu mulai proses pengumuman sampai serah terima hasil pekerjaannya yang dilakukan secara langsung dengan tatap muka, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penyimpangan yang melibatkan pejabat pengadaan dan pihak penyedia. Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sering disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan korupsi, dikarenakan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara manual menyebabkan tingginya tingkat korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan adanya berbagai masalah terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melaui Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengubah pengadaan barang dan jasa yang awalnya konvensional yang dinilai banyak menimbulkan masalah menjadi pengadan barang /jasa secara elektronik melalui aplikasi *E-katalog* yang dapat diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), sehingga dapat berjalan lebih transparan, efektif dan efisien, serta dapat meminimalisir tindak KKN yang melibatkan penyedia dan pengguna pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan bentuk dari konsep digitalisasi secara sistematis dan aplikatif. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*. Pada *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi untuk Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa Katalog Elektronik, Toko Daring dan Pemilih penyedia.

Kemajuan teknologi informasi saat sekarang mempermudah dalam pengadaan dimana pada awalnya pengadaan dilakukan secara manual sekarang pengadaan dapat dilakukan secara elektronik. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi tersebut dapat membantu para pelaku pengadaan barang/jasa yangmanfaatnya berupa pengadaan secara efesiensi, transparansi dan akuntabilitas serta juga memberikan kesempatan pada para pelaku usaha untuk ikut berpartispasi terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP).Maka dari itu pemerintah harus dapat memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini agar dapat meningkatkan efektivitas suatu produksi dan konsumsi yang lebih tinggi serta juga dapat pengembangan ke pasar-pasar baru.

Berdasarkan informasi dari LKPP pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik sudah mencapai jumlah transaksi sebesar Rp 207 trilyun pada tahun 2021. Hal ini karena jumlah dan jenis barang / jasa yang ada pada katalog elektronik sudah mencapai lebih dari 73.7090 produk. Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan organisasi seperti barang dan jasa yang sudah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *e-katalog* ini bertujuan untuk terpenuhi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan jumlah yang cukup dari setiap uang yang dibelanjakan serta tersedianya informasi terkait pengadaan barang dan jasa, mengwujudkan persaingan yang sehat di dunia usaha dan memberikan keadilan bagi penyedia barang dan jasa.

Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021 dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) belanja modal pengadaan kendaraan operasional atau lapang, yakni pengandaan 9 (sembilan) unit kendaraan dinas. Yang terdiri dari 6 (enam) unit motor (4 unit 155 CC dan 2 unit 230 CC) dan 3 (tiga) unit mobil (2 unit jenis suv double cabin 4x4 dan 1 unit pick up). dengan total pagu anggaran RP. 1.348.070.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan tujuh puluh rupiah).

Paket Penyedia

Detil Paket

Kode RUP	30058133
Nama Paket	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Satuan Kerja	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
Tahun Anggaran	2021
Lokasi Pekerjaan	

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi
1.	Sumatera Selatan	Palembang (Kota)	Jalan Aerobik No. 4 Kampus POM IX Palembang

Volume Pekerjaan	9 unit kendaraan dinas
Uraian Pekerjaan	6 unit motor (4 unit 155cc dan 2 unit 230cc) dan 3 unit mobil (2 unit jenis SUV double cabin 4x4 dan 1 unit pick up)
Spesifikasi Pekerjaan	6 unit motor (4 unit 155cc dan 2 unit 230cc) dan 3 unit mobil (2 unit jenis SUV double cabin 4x4 dan 1 unit pick up)
Produk Dalam Negeri	Ya
Usaha Kecil/Koperasi	Ya

Sumber : Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Gambar 1.1 Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Povinsi Sumatera Selatan tahun 2021

Sumber Dana

No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
1.	APBD	2021	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan	2.11.01.1.07.02.5.2.02.02.01.0001.0.0.0.00.00.00.000.00000	Rp. 1.384.070.000
Total Pagu					Rp. 1.384.070.000

Jenis Pengadaan	Barang,
Total Pagu	Rp. 1.384.070.000
Metode Pemilihan	E-Purchasing

Pemanfaatan Barang/Jasa

Mulai	Akhir
November 2021	Desember 2021

Jadwal Pelaksanaan Kontrak

Mulai	Akhir
September 2021	Oktober 2021

Jadwal Pemilihan Penyedia

Mulai	Akhir
September 2021	September 2021

Tanggal Perbarui Paket	2021-10-04 13:57:09.744

Sumber : Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP

Gambar 1.2 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021

Kendaraan dinas adalah salah satu aset tetap pemerintah yang digunakan sebagai mobilisasi kegiatan operasional dinas. Pengadaan kendaraan operasional dinas pada pemerintah dilakukan agar memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi yang menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Pengadaan kendaraan dinas seluruh Satuan Kerja Perangkat Daeah (SKPD) membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan pada anggaran nasional itu terbatas. Kendaraan dinas operasional merupakan barang milik negara. Barang Milik Negara (BMN) yakni dimana semua barang yang dibeli atau dimiliki atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dapat juga berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Mobil dinas pada Peraturan menteri keuangan Nomor 76 Tahun 2015 disebut dengan istilah Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (AADB Dinas Operasional Jabatan) yang merupakan kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada pengadaan kendaraan operasional dinas diperlukan standar barang dan standar kebutuhan sebagai referensinya. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai referensi perhitungan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan proses pengadaan barang/jasa tidak bisa lepas dari teknologi. *E-purchasing* merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. *E-katalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah. Peraruran pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)pada Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik padapenyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengadaan barang melalui aplikasi *e-katalog* di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan pada Sub Bagian Tata Usaha masih mengalami kendala dalam proses pelaksanaannya, diantarannya yaitu lamanya respon vendor ketika sudah dilakukan pemesanan barang, barang yang diinginkan tidak ada pada *e-katalog*, serta lamanya tayang barang yang akan dibeli terutama pada tayangnya produk kendaraan dimana penyedia harus selalu memperbarui tayangnya tahun kendaraan .

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian melalui aplikasi elektronik sudah banyak diteliti, seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi (2020) yang mengkaji penelitian tentang imlementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kota Tasikmalaya, Rini Syakina Cahyani (2017) yang mengkaji penelitian tentang analisis penerapan e-procurement dalam efektifitas pengadaan barang dan jasa pada Pt. Inalum (persero) dan Hidayat (2015) yang mengkaji penelitian tentang penerapan e-procurement dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mendukung ketahanan tata pemerintahan daerah (studi pada unit layanan pengadaan barang dan jasa pemerintahan kabupaten penajam paser utara). Namun belum banyak yang mengkaji tentang pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi di kota palembang. Penggunaan teori pengadaan secara elektronik dengan lokus Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi kebaruhan penelitian ini.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan agar lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan prinsip pengadan barang/jasa, dengan adanya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik ini dapa menyederhanakan proses yang berlangsung dalam

pengadaan barang/jasa sebab semua informasi bisa diakses pada aplikasi *e-katalog* serta dapat menghemat waktu dan biaya serta juga dapat meminimalisir kecurangan antara karyawan dengan vendor sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terwujud. Dengan adannya permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti dengan judul "Analisis Pelaksanaan Pembelian Kendaraan Operasional Dinas Melalui Aplikasi Elektronik (*E-katalog*) Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan" .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu, Bagaimana pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi elektronik (*E-katalog*) di Dinas lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelian kendaraan operasional dinas dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi elektronik (*E-katalog*) di Dinas lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis agar hasil penelitian ini dapat memberikanm informasi dan mengembangkan Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Keuangan Negara, khususnya terhadap pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik (*e-katalog*) di DLHP Provinsi Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis agar dapat menjadi pengetahuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sebagai referensi dalam hal bahan kajian terhadap pengadaan barang/jasa terutama pada pembelian kendaraan operasional dinas melalui aplikasi elektronik (*e-katalog*) di DLHP Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, C. S. (2017). Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik. Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 3.

Cahyani, R. S. (2017). Analisis Penerapan E-Procurement Dalam Efektifitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pt Inalum (Persero). 8.

Faisal, M. (2017). Implementasi E-Procurement Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang Dan Jasa Di Disfaslanal. Strategi Pertahanan Laut Vol 3 .

Heriawati, L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang2.

Hidayat, R. (2015). Penerapan E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah. Ketahanan Nasional , 122.

Malik, A. (2017). Teori Pengadaan Barang Dan Jasa. 2.

Michael Nelsen Lumintang, V. A. (2020). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara. Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Daerah , 107

Rahmalina, N. (2018). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Eletronik Di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.

Riswanti, R. M. (2018). Efektivitas E-Procurement Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017. 25.

Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2021 4 Tahun 2017 Ta Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedian.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

PERMENDAGRI No 17 Tahun 2007 Tentang Barang Milik Negara/Daerah

Spian, A. (2014). Dasar – Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. In Media

Sutedi, A.(2012). Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya.Sinar Grafika

Undang-undang No 54 Tahun 2010 Tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Undang-undang No 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018